



Terbit online pada laman web jurnal : <http://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/>

Warta Pengabdian Andalas

Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks

ISSN (Print) 0854-655X | ISSN (Online) 2797-1600

Strategi Penanggulangan Stunting di Nagari Labuah Panjang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Berbasis Posyandu: Studi Kasus Posyandu Mawar Melati

Muhammad Ichsan Kabullah, Desna Aromatica, Kusdarini, Hendri Koeswara, dan Malse Yulivestra

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, 25163. Indonesia

e-mail: muhammadichsankabullah@soc.unand.ac.id

Keywords:

malnourished
child, media
campaign, Solok
Regency,
strategy,
stunting

ABSTRACT

Solok Regency is one of the regencies that occupy the highest prevalence of stunting in West Sumatra Province, with a total of 41.47% with details child's height of 15.77% concise and 25.70% short. The various negative impacts of stunting will be challenging to handle amid the current Covid-19 pandemic due to the increasing economic burden on families and poverty rates. It directly affects the increasing number of malnutrition children receive. A malnourished child gradually fails to achieve a standard and healthy height according to age. Stunting has an impact on reducing the IQ of children in Indonesia by 10 to 15 points. There needs to be a substantial effort to provide strategy in the context of stunting prevention so that the program of integrated community service post is directed measurably. These strategies are expected to generate a definite commitment from every policymaker to push down the stunting problem. The steps in this community engagement were problem identification, introducing innovation and best practices, and making an action plan. The recommended substantial efforts were massive media campaigns, increasing responsible personnel competence, and changing the Local Government Budget Planning pattern.

Kata Kunci:

anak malnutrisi,
Kabupaten
Solok,
kampanye
media, strategi,
stunting

ABSTRAK

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang menempati prevelansi *stunting* tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan total sebesar 41,47% dengan rincian 15,77% sangat pendek dan 25,70% pendek. Berbagai dampak negatif dari *stunting* akan menjadi sulit ditangani ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang dialami saat ini, karena beban ekonomi keluarga yang semakin bertambah, dan peningkatan angka kemiskinan. Hal ini mempengaruhi secara langsung kepada semakin besarnya malnutrisi yang diterima anak. Ketika anak mengalami malnutrisi maka lambat laun mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai usia anak. *Stunting* berdampak pada penurunan IQ anak di Indonesia sebesar 10 sampai 15 poin. Perlu adanya upaya konkrit dalam memantik strategi posyandu dalam rangka pencegahan stunting, sehingga program diarahkan secara terukur. Strategi tersebut diharapkan memunculkan komitmen kuat setiap pemangku kebijakan dalam memerangi persoalan *stunting*. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah indentifikasi masalah, pengenalan inovasi dan *Best Practices*, dan pembuatan rencana aksi. Upaya konkrit yang direkomendasikan yaitu, kampanye media secara massif, peningkatan kompetensi personel, dan merubah pola Perencanaan Anggaran Pemerintah Nagari.

PENDAHULUAN

Stunting telah menjadi persoalan yang tidak kunjung terselesaikan bagi banyak wilayah di Indonesia. Studi yang dilakukan Beal, dkk. (2017) menunjukkan prevalensi *stunting* di Indonesia masih mencapai 37%. Data ini sejalan dengan beberapa data pembandingan lainnya seperti *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan termasuk prevalensi *stunting* Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan rata-rata balita *stunting* sebesar 36,4% dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2017. Hasil yang serupa juga muncul dari *United Nations Children's Fund* (Unicef) yang mencatat masih ada tujuh juta anak yang mengalami *stunting* di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat lima di dunia dengan jumlah balita tertinggi mengalami *stunting* dibawah India, China, Nigeria, dan Pakistan. Dengan tingginya prevalensi *stunting* di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, pemerintah Indonesia sebenarnya telah gagal melahirkan solusi yang bersifat komprehensif dalam penanganan *stunting*.

Kegagalan kebijakan penanggulangan *stunting* tentu patut diwaspadai. Menurut kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), *stunting* dengan kata lain anak pendek atau kerdil berimplikasi nyata bagi prestasi pendidikan yang buruk dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa (Trihono, dkk., 2015). Studi lain yang dilakukan Cahyono, dkk. (2016) juga mengungkapkan *stunting* berdampak pada penurunan IQ anak di Indonesia sebesar 10 sampai 15 poin, minimnya prestasi akademik anak dan dalam jangka panjang akan memperparah kemiskinan karena rendahnya tingkat kompetensi dalam memasuki dunia kerja. *Stunting* juga diibaratkan sebagai tragedi yang tersembunyi dimana dampak yang ditimbulkan tidak hanya mempengaruhi tingkat kecerdasan yang rendah, melainkan juga secara lebih luas mampu mempengaruhi morbiditas dan mortalitas pada balita, rendahnya intelektualitas dan kemampuan kognitif serta menimbulkan masalah penyakit degeneratif (Aryastami, 2017).

Berbagai dampak negatif dari *stunting* akan menjadi sulit ditangani ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang dialami saat ini. Dengan beban ekonomi keluarga yang semakin bertambah akibat pandemi Covid-19, kemiskinan yang dialami banyak keluarga diyakini dapat mempengaruhi secara langsung kepada semakin besarnya malnutrisi yang diterima anak. Ketika anak mengalami malnutrisi maka lambat laun mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai usia anak. Oleh karenanya, permasalahan *stunting* tidak dapat diintervensi secara lokalistik dari sudut pandang kesehatan semata, melainkan sebagai isu kompleks yang perlu ditangani bersama.

Dalam tataran praktik, kebijakan penanggulangan *stunting* telah dilakukan secara lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Upaya penanggulangan *stunting* yang dilakukan pemerintah pusat biasanya dilakukan pada kebijakan ditingkat makro dengan skala massif seperti pemberian vitamin dan makanan tambahan, imunisasi gratis bagi balita, edukasi tentang gizi, pemberian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS) sampai dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) (Rahmawati, dkk., 2020). Adapun ditingkatan pemerintah daerah, penanganan *stunting* dilakukan melalui intervensi yang bersifat kompelementer seperti optimalisasi posyandu dalam promosi kesehatan lingkungan, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan (Nisa, 2018). Dari berbagai intervensi kebijakan tersebut maka dapat dilihat bahwasannya pemerintah secara terstruktur mulai dari pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai langkah dalam penanggulangan *stunting*.

Meskipun berbagai inisiatif telah dibuat antar pemangku kebijakan, upaya pemerintah dalam mengurangi angka prevelansi *stunting* tidak mudah untuk dilakukan. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang masih menghadapi persoalan *stunting* sampai saat ini. Berdasarkan Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015-2017 terjadi peningkatan prevalensi *stunting* dari 25,5% pada tahun 2016 menjadi 30,6% di tahun 2017

(Syafarina, dkk., 2019). Ditahun 2018, angka prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) justru semakin naik menjadi 30,8% (Haluan, 2018). Atensi patut ditujukan pada beberapa daerah yang masih memiliki angka prevalensi *stunting* diatas 30% sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Prevalensi status gizi (TB/U) pada Anak Umur 0-59 Bulan (Balita) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Status Gizi Menurut TB/U									N tertimbang
	Sangat Pendek			Pendek			Normal			
	%	95 % CI		%	95% CI		%	95 % CI		
		Lower	Upper		Lower	Upper		Lower	Upper	
Kepulauan Mentawai	10,74	6,35	17,58	21,66	15,12	30,03	67,60	57,99	75,93	73
Pesisir Selatan	6,81	4,30	10,64	19,73	14,39	26,44	73,46	66,00	79,78	311
Solok	15,77	10,53	22,94	25,70	19,37	33,24	58,54	47,89	68,44	241
Sijunjung	13,90	7,56	24,15	21,10	14,79	29,19	65,00	54,78	74,01	157
Tanah Datar	8,40	5,01	13,75	17,87	12,68	24,58	73,73	66,85	79,61	194
Padang Pariaman	4,50	2,03	9,69	21,59	15,79	28,79	73,91	66,62	80,09	247
Agam	11,30	6,50	18,94	18,74	12,59	26,95	69,96	60,88	77,71	275
Lima Puluah Kota	10,78	6,61	17,08	29,35	21,16	39,13	59,87	50,23	68,81	238
Pasaman	15,89	10,64	23,06	24,67	18,79	31,68	59,44	50,89	67,45	191
Solok Selatan	10,94	6,35	18,21	16,78	11,38	24,04	72,28	62,82	80,09	110
Dharmasraya	6,74	3,81	11,63	23,60	17,77	30,63	69,66	61,73	76,57	170
Pasaman Barat	10,75	6,72	16,76	24,35	17,71	32,49	64,90	55,17	73,52	320
Kota Padang	7,91	5,12	12,02	14,54	10,56	19,69	77,56	71,40	82,71	534
Kota Solok	11,13	6,92	17,41	12,45	7,49	20,00	76,42	68,23	83,02	42
Kota Sawah Lunto	3,28	1,23	8,50	17,35	10,24	27,87	79,37	69,43	86,70	36
Kota Padang Panjang	10,42	6,07	17,33	16,81	9,93	27,03	72,76	59,87	82,71	33
Kota Bukittinggi	5,58	2,42	12,37	11,58	6,95	18,68	82,84	75,70	88,20	74
Kota Payakumbuh	6,06	2,91	12,18	13,18	8,25	20,42	80,76	72,79	86,81	87
Kota Pariaman	3,60	1,27	9,73	14,17	9,57	20,48	82,23	74,74	87,87	49
Prov. Sumatera Barat	9,58	8,35	10,97	21,66	15,12	30,03	70,11	67,87	72,27	3.380

Sumber: Laporan Riskesdas Sumatera Barat Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang menempati prevelansi *stunting* tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan total sebesar 41,47% dengan rincian 15,77% sangat pendek dan 25,70% pendek. Data tersebut menunjukkan perlunya kolaborasi dari banyak pihak dalam mendukung kebijakan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Solok. Hal ini mengingat terbatasnya kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan prevalensi *stunting* sebesar 41,47%, Kabupaten Solok merupakan kabupaten tertinggi di Provinsi Sumatera Barat yang paling buruk dalam penanganan *stunting*. Angka tersebut juga melebihi rata-rata *stunting* nasional sebesar 30,8%. Oleh karena itu, hal ini patut ditelusuri lebih jauh mengingat implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* telah lama dijalankan pemerintah.

Dalam konteks persoalan *stunting* di Indonesia, studi-studi terkait implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* baru menemukan fenomena koordinasi, pendanaan, dan partisipasi publik khususnya dari aparat pemerintah desa (Tampubolon, 2020). Adapun studi dari Nisa (2018) menguraikan meskipun penanggulangan *stunting* sudah diatur oleh banyak regulasi, implementasinya tidak diikuti dengan tindaklanjut di daerah sampai pada tingkat desa atau nagari. Dari berbagai studi tersebut menegaskan kebijakan penanggulangan *stunting* masih berjalan parsial dan belum mampu mengikat banyak pihak.

Patut diakui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan stunting belum tuntas dilakukan. Intervensi pemerintah melalui program pemberian vitamin, pemberian imunisasi lengkap, dan lain-lain tidak serta merta menurunkan angka kasus *stunting*. Disaat yang bersamaan, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menambah peliknya permasalahan stunting. Hal ini tentu akan menghambat akselerasi penanganan stunting di Kabupaten Solok. Oleh karena itu, penting kiranya mendorong peran serta nagari khususnya unit fasilitas kesehatan terendah yakni posyandu dalam melakukan inovasi pengendalian dan pencegahan stunting.

Oleh karena itu, *stunting* sebagai persoalan bersama telah sepatutnya mendapat atensi oleh seluruh pihak. Sebagai unit fasilitas kesehatan terdepan, peran serta posyandu dalam rangka membuat terobosan dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* sangat dibutuhkan. Berangkat dari hal tersebut, perlu adanya upaya konkrit dalam memantik strategi posyandu dalam rangka pencegahan *stunting*. Dengan memperkuat strategi, maka diharapkan program-program posyandu dapat diarahkan secara terukur dalam upaya pengendalian *stunting*. Disamping itu, strategi tadi diharapkan juga memunculkan komitmen kuat setiap pemangku kebijakan dalam memerangi persoalan *stunting*.

MATERI

Tim pengabdian kepada masyarakat mengambil lokasi kegiatan di Posyandu Mawar Melati, Nagari Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas mengingat lokasi ini letaknya relatif terisolir dan jauh dari ibukota kabupaten. Apalagi dengan topografis daerah perbukitan, jangkauan fasilitas kesehatan termasuk mendapat gizi balita yang layak tidak akan mudah dilakukan. Disinilah pentingnya untuk memberikan pelatihan penguatan kapasitas masyarakat berbasis posyandu. Dengan memperkuat strategi penanggulangan *stunting* berbasis posyandu maka diharapkan tumbuh akselerasi program penanganan *stunting*. Disamping itu, keberadaan posyandu tadi diharapkan juga menginspirasi masyarakat agar bersama pemerintah turut mendorong tumbuhnya anak-anak yang sehat.

Mendorong strategi penanggulangan *stunting* yang adaptif ditengah masyarakat bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan rencana aksi dan advokasi yang lebih terintegrasi dengan melibatkan peran serta seluruh pihak. Dengan melakukan advokasi di Posyandu Mawar Melati, Nagari Labuah Panjang maka diharapkan strategi yang lahir dapat secara alamiah hadir dan efektif dalam melakukan penanggulangan *stunting*. Berangkat dari hal tersebut maka langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Indetifikasi masalah

Sebuah strategi tidak akan lahir tanpa adanya sensitifitas yang baik. Lambannya strategi kerap disebabkan adanya kultur permisif dan anggapan terkait *stunting* sebagai persoalan biasa dan normal dalam kehidupan keseharian. Oleh karena itu, pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi persoalan terhadap persoalan *stunting* di Nagari Labuah Panjang melalui uraian permasalahan dari para peserta atas apa yang pernah mereka alami.

2. Pengenalan Inovasi dan *Best Practices*

Pada tahapan ini peserta akan diperkenalkan karakteristik-karakteristik strategi termasuk pada unit kesehatan yang berhadapan dengan persoalan seperti *stunting*. Pengenalan terhadap inovasi akan diimbangi dengan mempelajari pengalaman daerah lain khususnya *best practices* dalam penanggulangan *stunting*.

3. Pembuatan rencana aksi

Pembuatan rencana aksi dapat menggambarkan prioritas agenda yang bisa dilakukan Posyandu Mawar Melati dalam penanggulangan *stunting* di Nagari Labuah Panjang.

Pembuatan model ini tentu didasari atas pemaparan peserta pada tahapan sebelumnya. Berangkat dari pemaparan tersebut maka fasilitator memperkenalkan metode inovasi dan adopsi atas *best practices* di daerah yang berhasil melakukan penanggulangan *stunting*. Adapun khalayak sasaran strategis yang dilibatkan dalam kegiatan pelatihan tentu lebih memprioritaskan seluruh petugas posyandu di Nagari Labuah Panjang.

Sangatlah penting untuk menetapkan parameter yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Adapun target pada kegiatan strategi posyandu dalam penanggulangan *stunting* di Nagari Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peningkatan pengetahuan kepada petugas posyandu terkait dengan pentingnya strategi khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting*.
2. Menumbuhkan komitmen bersama untuk mendorong suksesnya strategi dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting*.
3. Peserta mampu membuat rencana aksi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan, posyandu perlu inovatif dalam penanggulangan *stunting*. Hal tersebut sangatlah penting dalam rangka menjamin layanan kesehatan yang maksimal, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat dan bebas *stunting*. Untuk itu, kami memutuskan melakukan kegiatan pengabdian dalam rangka memfasilitasi Posyandu Mawar di Nagari Labuah Panjang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok untuk merumuskan strategi penanggulangan *stunting*.

Dipaparan awal, tim pengabdian mencoba memetakan pengetahuan masyarakat tentang *stunting*. Bagi masyarakat, istilah *stunting* tidak begitu dikenal. Hanya saja ciri-ciri *stunting* seperti berat badan dan tinggi bayi yang dibawah rata-rata masih ditemui mengingat asupan makanan yang kurang bergizi akibat rendahnya kemampuan ekonomi keluarga. Disamping itu, kerap orang tua dari bayi *stunting* kurang mudah mengidentifikasi mengingat minimnya bandingan dengan bayi yang sehat. *Stunting* di Nagari Labuah Panjang juga tidak mudah ditanggulangi mengingat sanitasi yang buruk. Salah seorang peserta mengungkapkan istilah “asoy terbang”, yakni plastik yang digunakan untuk membuang tinja dan dibuang ketanah yang disebabkan ketiadaan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK). Situasi tidak adanya MCK yang representatif sangatlah wajar mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah dan kondisi geografis yang berbukit. Akibatnya *stunting* menjadi persoalan klasik di Nagari Labuah Panjang.

Stunting yang menjadi realitas keseharian di Nagari Labuah Panjang membuat pemerintah berupaya melakukan penanggulangan. Posyandu, sebagai unit layanan kesehatan terdepan, didorong untuk inovatif. Berkaca dari salah satu dari dua posyandu yang ada di Nagari Labuah Panjang, Posyandu Mawar sebenarnya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas. Minimnya SDM tersebut membuat posyandu berinisiatif mengajak ibu-ibu dilingkungan sekitar untuk mengikuti penyuluhan sebagai kader posyandu. Para kader posyandu diminta sebagai pihak terdepan untuk mengidentifikasi apabila ditemukan kasus *stunting* serta membantu pencegahan dan penanggulangan persoalan kesehatan yang ada dimasyarakat keseharian termasuk persoalan *stunting*. Untuk meningkatkan informasi dan pengetahuan kader, seluruh organisasi pemerintah daerah mulai dari kecamatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok telah memfasilitasi kegiatan penyuluhan kepada kader posyandu dalam program kerja dinas setiap tahunnya.

Fakta yang terlihat adalah peran pemerintah daerah untuk menganggarkan kegiatan terkait pencegahan dan penanggulangan *stunting* tidak berjalan konsisten. Pasca pandemi Covid-19, kegiatan penyuluhan dari pemerintah tingkat kecamatan di puskesmas dalam

memberantas *stunting* tidak lagi berjalan. Jikapun berjalan, pelatihan yang diberikan masih berupa penyuluhan kesehatan secara umum yang dilakukan kader posyandu dan tidak lagi fokus ke *stunting*. Hal tersebut terpaksa ditempuh mengingat *refocusing* anggaran seharusnya tidak menghambat kegiatan penyuluhan sebagai sarana pemberian dalam rangka mencegah *stunting*.

Hanya saja, keberadaan kegiatan seperti penyuluhan yang dilakukan kader posyandu tersebut tidaklah cukup dalam melakukan penanggulangan *stunting* tanpa mendapat dukungan dari masyarakat. Menurut salah seorang peserta:

"Biasanya yang memberikan penyuluhan ialah kader yang telah dilatih. Para kader hanya mengingatkan untuk makan makanan yang menghambat *stunting*, tapi yang melaksanakan kegiatan tentu orang yang diberikan penyuluhan. Artinya, harus ada juga dukungan dari pihak keluarga, terutama seorang ibu."

Dalam konteks di Nagari Labuah Panjang, peran keluarga sangatlah krusial dalam penanggulangan *stunting* mengingat Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat dengan kasus *stunting* tertinggi. Akan tetapi, informasi yang diberikan melalui penyuluhan tersebut terkesan tidak begitu maksimal. Hal ini dapat terlihat dimana secara umum Ibu yang anaknya mengalami *stunting* tidak memiliki kemampuan untuk mengolah makanan, misalnya variasi untuk memasak sayur sebagai asupan anak. Disamping itu, setiap perempuan baik ibu menyusui dan wanita yang akan menikah perlu diberi pelatihan dalam hal masak memasak. Hal ini penting dilakukan dalam mengingat makanan bergizi merupakan salah satu upaya pencegahan *stunting*.

Dari pemetaan persoalan *stunting* di Nagari Labuah Panjang maka penting kiranya membangun manajemen adaptif (Mitchell & Mitchell, 2019). Berangkat dari hal tersebut, kegiatan pengabdian merekomendasikan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Kampanye Media secara Massif

Disrupsi teknologi yang begitu cepat berjalan dipercaya mampu memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap cara bekerja dan bertindak birokrasi publik (Reddick, dkk., 2017). Meskipun keberadaan Posyandu Mawar di Nagari Labuah Panjang belum memiliki perangkat teknologi yang memadai, semua pihak termasuk masyarakat seharusnya bisa melakukan update persoalan terkait *stunting* sehingga didapat informasi aktual terkait nagari. Kampanye yang dilakukan secara massif diruang digital lambat laun akan mendorong terbentuknya kepedulian sosial dari masyarakat luas termasuk dalam melakukan penggalangan dana/ *fund raising*.

2. Peningkatan Kompetensi Personel

Peningkatan kompetensi petugas posyandu dan kader adalah kunci bagi kemampuan bagi Nagari Labuah Panjang menghadapi persoalan *stunting*. Oleh karena itu, nagari selayaknya tidak lagi hanya mengandalkan pemerintah dalam upaya peningkatan kompetensi aparaturanya. Pemerintah nagari bersama seluruh elemen masyarakat dapat mengajak keterlibatan publik yang lebih luas dalam peningkatan kompetensi SDM khususnya bagi kader posyandu. Beberapa langkah tersebut diantaranya mengundang Perguruan Tinggi untuk mendatangkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dari pengalaman yang sudah ada, kehadiran mahasiswa KKN khususnya dari bidang studi yang relevan mampu memberikan dampak positif kepada pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

3. Merubah Pola Perencanaan Anggaran Pemerintah Nagari

Paradigma pemerintah yang memiliki ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu digeser. Dalam perspektif manajemen adaptif, persoalan anggaran tidak dilihat dari besar kecilnya jumlah yang disediakan melainkan alokasi anggaran terhadap program-program prioritas berbasis analisis resiko atau yang diistilahkan *public-sector risk*. Untuk itu, adanya *refocusing* anggaran yang dilakukan pemerintah selayaknya

disikapi dengan memprioritaskan program/ kegiatan nagari yang betul-betul bersentuhan langsung dengan persoalan *stunting*.

Ketiga langkah strategis tersebut sangat mungkin dilakukan di skala Nagari Labuah Panjang. Untuk itu, seluruh perangkat Nagari bersama warga harus solid dalam mensukseskan strategi diatas. Disamping itu, perlu pula adanya dukungan aktivitas lain seperti mendorong keterlibatan kelompok masyarakat lainnya. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya memperkuat rasa kepedulian masyarakat atas pemerintah persoalan *stunting*. Di akhir kegiatan, tim pengabdian melakukan pemberian cenderamata dan memberi motivasi kepada seluruh peserta untuk optimis menghadapi persoalan *stunting*.



Gambar 1. Tim Pengabdian kepada Masyarakat bersama Kader Posyandu Mawar Melati

KESIMPULAN

Kolaborasi antar pihak sangatlah dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Posyandu sebagai unit layanan kesehatan terdepan, menjadi aktor penting dalam penanggulangan *stunting* mengingat keberadaannya yang langsung bersentuhan di masyarakat. Berkaca dari pengalaman di Nagari Labuah Panjang, strategi kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* yang dilakukan Posyandu Mawar Melati sebenarnya telah berjalan dengan baik meski ditengah terbatasnya kapasitas keuangan pemerintah akibat krisis pandemi Covid-19. Hanya saja, strategi posyandu selayaknya dapat lebih adaptif dan inovatif seperti kampanye media secara masif, peningkatan kompetensi personel baik petugas dan kader posyandu, serta revitalisasi perencanaan ditingkat pemerintah nagari berbasis penanggulangan *stunting*. Dengan demikian upaya penanggulangan *stunting* dapat lebih maksimal dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Aryastami, N. K. (2017). Kajian kebijakan dan penanggulangan masalah gizi stunting di Indonesia. *Indonesian Bulletin of Health Research*, 45(4), 233-240.

- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal & child nutrition*, 14(4), e12617.
- Cahyono, F., Manongga, S. P., & Picauly, I. (2016). Faktor penentu stunting anak balita pada berbagai zona ekosistem di Kabupaten Kupang. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 11(1).
- Mitchell, F. H., & Mitchell, C. C. (2019). *Adaptive Administration: Practice Strategies for Dealing with Constant Change in Public Administration and Policy*. New York: Routledge.
- Nisa, L. S. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 173-179.
- Rahmawati, N. F., Fajar, N. A., & Idris, H. (2020). Faktor sosial, ekonomi, dan pemanfaatan posyandu dengan kejadian stunting balita keluarga miskin penerima PKH di Palembang. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 17(1), 23-33.
- Reddick, C. G., Chatfield, A. T., & Ojo, A. (2017). A social media text analytics framework for double-loop learning for citizen-centric public services: A case study of a local government Facebook use. *Government Information Quarterly*, 34, 1-16.
- Syafrina, M., Masrul, M., & Firdawati, F. (2019). Analisis Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Mengatasi Masalah Stunting Berdasarkan Nutrition Commitment Index 2018. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(2), 233-244.
- Tampubolon, D. (2020). Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 25-32.
- Trihono, T., Atmarita, A., Tjandrarini, D. H., Irawati, A., Nurlinawati, I., Utami, N. H., & Tejayanti, T. (2015). *Pendek (stunting) di Indonesia, masalah dan solusinya*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Litbangkes.